

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian.....	10

1.5.1	Tipe penelitian hukum.....	10
1.5.2	Pendekatan (<i>approach</i>)	10
1.5.3	Sumber bahan hukum (<i>legal sources</i>)	11
1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum	15
1.5.5	Analisis bahan hukum	16
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	17
 BAB II <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA TERKAIT RESTITUSI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA		
		19
2.1	Konsep Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	19
2.2	Pengaturan Restitusi Korban Tindak Pidana di Indonesia	22
2.3	Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Pidana	30
2.4	Putusan Pengadilan Yang Menerima Permohonan Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	34
2.4.1	Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Wat.....	34
2.4.1.1	Ratio decidendi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Wat terkait restitusi	34
2.4.1.2	Analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Wat	39

2.4.2	Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr	42
2.4.2.1	Ratio decidendi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr terkait restitusi	42
2.4.2.2	Analisis Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr	47
2.5	Putusan Pengadilan Yang Menolak Permohonan Restitusi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana	50
2.5.1	Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.PWK.....	51
2.5.1.1	Ratio decidendi Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.PWK terkait restitusi.....	51
2.5.1.2	Analisis Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.PWK	55
2.5.2	Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT.Amb	57
2.5.2.1	Ratio decidendi Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT.Amb terkait restitusi.....	57
2.5.2.2	Analisis Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT.Amb	60
 BAB III AKIBAT HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (<i>INKRACHT VAN GEWIJSDE</i>) TERKAIT RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA		
3.1	Pengertian Akibat Hukum	64

3.2	Terpidana Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht van Gewijsde</i>) Terkait Pembayaran Restitusi	66
3.2.1	Terpidana tidak mampu untuk membayar restitusi kepada korban	67
3.2.2	Terpidana tidak beritikad baik untuk membayar restitusi kepada korban	75
3.3	Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Restitusi Yang Tidak Dibayarkan.....	79
BAB IV PENUTUP		84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Saran	85
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompesasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompesasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Amb.

Putusan Tinggi Ambon Nomor 57/Pid.Sus/2017/PT.Amb.

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 108/Pid.Sus/2018/PN.PWK.

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Wat.

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.

Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN.Wtp.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb.